

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjalanan sejarah bangsa Indonesia di abad ke-20 ditandai oleh berbagai pergolakan politik, namun tidak ada satu pun peristiwa yang memiliki dampak struktural sedalam tragedi yang meletus pada pertengahan dekade 1960-an. Peristiwa yang secara umum dikenal sebagai Gerakan 30 September 1965 (G30S) bukan sekadar insiden militer semalam yang gagal, melainkan sebuah titik ledak dari akumulasi ketegangan ideologis, politik, dan sosial yang telah memanas selama bertahun-tahun sebelumnya. Dalam konteks global, Indonesia pada masa itu adalah episentrum geopolitik Perang Dingin, di mana tarikan antara Blok Barat yang dipimpin Amerika Serikat dan Blok Timur yang diwakili oleh Uni Soviet serta Republik Rakyat Tiongkok menciptakan polarisasi tajam di tingkat elite maupun akar rumput. Di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno yang semakin condong ke kiri dengan poros Jakarta-Peking-Pyongyang, Partai Komunis Indonesia (PKI) tumbuh menjadi partai komunis non-penguasa terbesar di dunia, sebuah fakta yang menimbulkan kecemasan mendalam bagi Angkatan Darat dan kekuatan-kekuatan Barat yang berkepentingan di Asia Tenggara.¹

Ketegangan struktural ini mencapai titik nadirnya pada malam 30 September dan dini hari 1 Oktober 1965, ketika enam jenderal pimpinan Angkatan Darat diculik dan dibunuh oleh sekelompok perwira militer yang menamakan diri mereka Gerakan 30 September. Meskipun durasi gerakan ini sangat singkat dan hanya terjadi di Jakarta serta Yogyakarta, dampak ikutannya mengguncang fondasi republik hingga ke akarnya. Peristiwa ini menjadi katalisator bagi runtuhnya tatanan Demokrasi Terpimpin dan membuka jalan bagi naiknya Mayor Jenderal Soeharto ke puncak kekuasaan. Transisi kekuasaan ini diikuti oleh rentetan kekerasan massal berskala nasional yang berdampak

¹ M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004* (Jakarta: Serambi, 2008), 560-565.

pada ratusan ribu korban jiwa, dengan eskalasi yang memanjang dari Aceh hingga Nusa Tenggara.²

Kekerasan yang terjadi pasca-Oktober 1965 bukanlah kerusuhan biasa. Fenomena ini merupakan sebuah operasi pembersihan sistematis yang menargetkan anggota PKI, simpatisannya, aktivis organisasi sayap (seperti Gerwani, BTI, Lekra), hingga kelompok etnis Tionghoa yang sering kali dikaitkan dengan komunisme. Di berbagai daerah, infrastruktur penahanan penuh sesak melebihi kapasitas, dan kamp-kamp penahanan dadakan dikonstruksi di seluruh penjuru nusantara. Tragedi ini meninggalkan dampak sosiologis yang mendalam dalam memori kolektif bangsa, menciptakan kondisi yang diklasifikasikan oleh studi sejarah kontemporer sebagai genosida politik yang mengubah struktur masyarakat Indonesia secara permanen. Hubungan antar-tetangga mengalami keretakan, kepercayaan sosial memudar, dan ketakutan menjadi instrumen utama kontrol sosial.³

Setelah berhasil mengonsolidasikan kekuasaannya pada tahun 1966-1967, rezim Orde Baru menyadari perlunya membangun legitimasi politik pasca-terjadinya rentetan kekerasan massal tersebut. Untuk itu, negara mengonstruksi sebuah narasi sejarah yang tunggal dan hegemonik. Rezim militer di bawah Soeharto melakukan operasi ingatan (*memory operation*) secara masif. Melalui sejarawan militer Nugroho Notosusanto, negara menyusun sejarah resmi yang menempatkan PKI sebagai dalang tunggal, sementara militer diposisikan sebagai penyelamat yang datang untuk mengamankan Pancasila dari ancaman ideologi ateis. Dalam narasi ini, pembunuhan massal direduksi maknanya, dikaburkan faktanya, atau dijelaskan sebagai "amuk massa spontan" akibat kemarahan rakyat yang tak terbendung.⁴

Hegemoni narasi Orde Baru ini ditanamkan secara totaliter melalui aparatus ideologis negara. Di sektor pendidikan, kurikulum sejarah direvisi total untuk memastikan setiap generasi muda Indonesia tumbuh dengan memori yang seragam tentang ancaman

² Robert Cribb (ed.), *The Indonesian Killings of 1965-1966: Studies from Java and Bali* (Clayton: Monash University Centre of Southeast Asian Studies, 1990), 12.

³ Hermawan Sulistyono, *Palu Arit di Ladang Tebu: Sejarah Pembantaian Massal yang Terlupakan (1965-1966)* (Jakarta: KPG, 2000), 45.

⁴ Asvi Warman Adam, *Membongkar Manipulasi Sejarah: Kontroversi Pelaku dan Peristiwa* (Jakarta: Kompas, 2009), 125-130.

PKI dan peran Angkatan Darat. Di ruang publik, monumen-monumen seperti Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya dibangun sebagai situs wajib yang mensakralkan narasi penguasa tersebut. Puncaknya adalah produksi film dokudrama Pengkhianatan G30S/PKI karya Arifin C. Noer pada tahun 1984, yang menjadi instrumen tontonan wajib tahunan setiap tanggal 30 September. Film ini secara efektif menanamkan memori ketakutan melalui visualisasi kekerasan secara eksplisit, menciptakan stigma permanen terhadap kelompok kiri.⁵

Lebih jauh lagi, rezim Orde Baru menerapkan kebijakan "Bersih Lingkungan" (Litsus) yang mencabut hak-hak perdata para korban dan keturunannya. Stigma "Eks-Tapol" (Tahanan Politik) dicatatkan pada dokumen kependudukan, menutup akses mereka untuk menjadi pegawai negeri, tentara, atau memegang jabatan publik. Kebijakan ini tidak hanya menghukum secara fisik, tetapi juga mematikan hak perdata mereka secara sosial (*social death*), memastikan bahwa narasi perlawanan atau versi alternatif dari para korban teredam oleh represi sistematis. Selama lebih dari 32 tahun, historiografi 1965 di Indonesia adalah narasi yang dimonopoli oleh penguasa, sementara sejarah dari pihak korban direpresi secara struktural.⁶

Runtuhnya rezim otoriter Orde Baru pada Mei 1998 menjadi momentum "ledakan memori" yang membuka ruang diskursif baru. Keran kebebasan pers dan akademik yang terbuka di Era Reformasi memungkinkan masuknya arus informasi yang selama ini dibendung. Para penyintas yang selama puluhan tahun bungkam mulai memberikan kesaksian (*testimony*). Investigasi terhadap lokasi-lokasi penahanan dan eksekusi massal mulai dilakukan secara terbuka. Organisasi masyarakat sipil seperti KontraS dan ELSAM melakukan investigasi independen, sementara Komnas HAM perlahan menyusun laporan penyelidikan pro-justitia atas dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu.⁷

Dalam ranah akademis, Reformasi memicu gelombang baru historiografi 1965 atau yang sering disebut sebagai *New Historiography of 1965*. Karya-karya akademisi asing yang sebelumnya dilarang beredar di Indonesia, seperti analisis kritis Benedict Anderson,

⁵ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Benteng Pustaka, 2013), 20.

⁶ Katharine E. McGregor, *History in Uniform: Military Ideology and the Construction of Indonesia's Past* (Singapore: NUS Press, 2007), 114-120.

⁷ Saskia Wieringa, *Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia* (Jakarta: Garba Budaya, 1999), 150.

Ruth McVey, dan Harold Crouch, mulai diterjemahkan dan didiskusikan secara terbuka di kampus-kampus. Generasi sejarawan baru muncul dengan pertanyaan-pertanyaan struktural: Benarkah PKI dalang tunggal? Apakah Soeharto terlibat dalam merancang transisi kekuasaan? Sejauh mana keterlibatan negara-negara Barat seperti Amerika Serikat dan Inggris dalam memfasilitasi operasi pembersihan tersebut.⁸

Dinamika kebebasan akademik ini secara langsung berdampak pada lanskap penerbitan buku-buku sejarah 1965 di Indonesia yang berkembang sangat menonjol pasca-Reformasi. Jika sebelumnya produksi literatur dimonopoli dan disensor oleh negara, era 2000-an ditandai oleh kebangkitan publikasi alternatif yang masif. Pasar perbukuan nasional diramaikan oleh penerbitan memoar eks-tahanan politik, terjemahan disertai *Indonesianist* dari luar negeri, hingga penelitian arsip terbaru yang menantang kemapanan narasi resmi. Fenomena literasi ini menciptakan kontestasi diskursif yang memaksa publik dan akademisi untuk mengevaluasi kembali sumber-sumber sejarah 1965 melalui lensa yang lebih kritis dan multiperspektif.

Seiring dengan berkembangnya publikasi tersebut, fokus kajian historiografi 1965 juga mengalami evolusi struktural yang signifikan. Pada dekade-dekade awal, kajian akademis baik dari dalam maupun luar negeri cenderung bersifat *Coup-centric*, yakni terlalu terfokus pada intrik politik tingkat tinggi di Jakarta dan mencari tahu siapa dalang sebenarnya di balik penculikan para jenderal. Namun, diskursus ini perlahan bergeser menjadi *Massacre-centric*, di mana para akademisi mulai menyadari bahwa titik sentral peristiwa ini sesungguhnya terletak pada eksekusi massalnya, bukan sekadar kudetanya. Jauh sebelum era keterbukaan arsip pasca-Reformasi, rintisan untuk membedah dimensi kekerasan di luar narasi Jakarta-sentris sebenarnya telah diinisiasi oleh sejarawan Robert Cribb pada tahun 1990 melalui antologi *The Indonesian Killings of 1965-1966*. Karya Cribb menjadi pionir dalam historiografi yang memfokuskan analisis pada variasi regional dan pola kekerasan di tingkat lokal.

Cribb berargumen bahwa kekerasan tersebut sangat dipengaruhi oleh dinamika sosial dan ketegangan struktural di masing-masing wilayah. Namun, keterbatasan akses arsip internal pada masa itu membuat kajian awal mengenai dimensi lokal ini masih sering

⁸ Benedict R. Anderson and Ruth T. McVey, *A Preliminary Analysis of the October 1, 1965 Coup in Indonesia* (Ithaca, NY: Cornell Modern Indonesia Project, 1971).

terjebak pada asumsi kekosongan kekuasaan (*power vacuum*), yang memposisikan letupan kekerasan seolah-olah terjadi akibat lemahnya kontrol negara di daerah, bukan sebagai sebuah operasi terkendali.

Kekurangan tersebut kemudian dijabatani oleh salah satu tonggak terpenting dalam gelombang historiografi kontemporer, yakni terbitnya buku *Dalih Pembunuhan Massal* karya John Roosa pada tahun 2006. Roosa berhasil menggeser secara definitif fokus perdebatan dari identifikasi dalang G30S (pertanyaan *whodunit* klasik) menjadi analisis kritis mengenai mengapa insiden G30S sengaja dieksploitasi dan dijadikan alasan operasional (*pretext*) untuk membenarkan penghancuran PKI secara fisik. Meskipun kajian Roosa sangat komprehensif dalam membongkar rekayasa politik di ibu kota, masih terdapat ruang kosong yang lebar dalam konstelasi narasi tersebut. Kekosongan ini mencakup detail mekanika birokrasi militer dalam mengeksekusi kekerasan di tingkat daerah, serta penjelasan mengenai sejauh mana operasi domestik tersebut disinkronisasikan dengan agenda geopolitik internasional.⁹

Kekosongan literatur historis yang komprehensif inilah yang kemudian dijawab oleh dua karya monumental yang terbit bersamaan pada tahun 2018, tepat dua dekade setelah dimulainya era Reformasi. Kedua buku tersebut adalah *The Killing Season: A History of the Indonesian Massacres, 1965-66* karya Geoffrey B. Robinson dan *The Army and the Indonesian Genocide: Mechanics of Mass Murder* karya Jess Melvin. Penerbitan kedua buku ini menjadi representasi kulminasi dari pencarian bukti empiris sejarah selama lebih dari setengah abad. Keduanya menawarkan data primer yang sangat melimpah, kerangka analitis yang tajam, dan pembaruan teoretis yang secara radikal melampaui capaian karya-karya historiografi sebelumnya. Hal yang menjadikan kedua karya ini sangat krusial untuk dikomparasikan bukanlah pada kesamaan temanya, melainkan pada ketajaman divergensi pendekatan analitis yang mereka gunakan secara diametral.¹⁰

Geoffrey B. Robinson, seorang sejarawan dan ilmuwan politik dari UCLA, mendekati peristiwa ini menggunakan kacamata Makro-Historis. Ia melukiskan konstruksi

⁹ John Roosa, *Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto* (Jakarta: Institut Sejarah Sosial Indonesia dan Hasta Mitra, 2008), 1-5.

¹⁰ Vanessa Hearman, *Unmarked Graves: Death and Survival in the Anti-Communist Violence in East Java, Indonesia* (Singapore: NUS Press, 2018), 10.

arsitektur kekuasaan yang menghubungkan dinamika politik nasional di Jakarta dengan konstelasi politik internasional secara utuh. Dengan memanfaatkan ribuan halaman arsip diplomatik Amerika Serikat dan Inggris yang telah dideklasifikasi, Robinson membuktikan bahwa kekerasan 1965 merupakan sebuah proyek historis yang tidak dapat dilepaskan dari hegemoni geopolitik global. Ia mendemonstrasikan bagaimana negara-negara Barat tidak hanya mengetahui fenomena tersebut, tetapi secara proaktif memfasilitasi, mendanai, dan menyediakan instrumen propaganda krusial bagi Angkatan Darat untuk melegitimasi penghancuran kelompok kiri. Robinson menganalisis struktur kekerasan ini melalui model analisis dari "atas ke bawah" (*top-down*), menempatkan Jakarta dan agensi global sebagai pusat perumusan komando, sementara daerah direduksi sebagai wilayah pelaksana kebijakan.¹¹

Sebaliknya, Jess Melvin, seorang sejarawan forensik dari Australia, mendekati kompleksitas peristiwa ini dengan menggunakan kacamata Mikro-Historis. Berangkat dari penelitian lapangan yang intensif di provinsi Aceh, Melvin secara tak terduga menemukan arsip internal militer Indonesia dari tahun 1965 (*The Indonesian Genocide Files*). Melalui ribuan dokumen administratif harian tersebut, Melvin mendekonstruksi asumsi mapan bahwa eskalasi kekerasan di daerah adalah respons spontan masyarakat sipil atau sekadar efek tumpahan (*spill-over*) dari gejolak di pusat kekuasaan. Temuan empirisnya membuktikan secara tak terbantahkan bahwa institusi militer di tingkat komando daerah memiliki inisiatif taktis yang mandiri dan telah mengorkestrasi operasi pembersihan secara birokratis melalui rantai komando resmi. Melvin memetakan struktur kekerasan ini secara induktif dari bawah ke atas (*bottom-up*) dan secara yuridis mengklasifikasikannya sebagai genosida berdasarkan bukti niat institusional yang terencana.¹²

Perbedaan pendekatan makro Robinson dan mikro Melvin ini menghadirkan sebuah dialektika yang krusial dalam historiografi sejarah modern. Perdebatan akademik pun bergeser pada apakah rekonstruksi sejarah atas sebuah genosida lebih presisi jika dilihat melalui arsitektur kebijakan politik di ibu kota, atau melalui detail forensik-administratif yang merekam maut di tingkat daerah. Hal ini juga mempertanyakan di mana

¹¹ Geoffrey B. Robinson, *Musim Menjagal: Sejarah Pembunuhan Massal di Indonesia 1965-1966* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2018), 289-320.

¹² Jess Melvin, *The Army and the Indonesian Genocide: Mechanics of Mass Murder* (London: Routledge, 2018), 1-15.

letak agensi utama dalam peristiwa pemusnahan massal tersebut: apakah di tangan para diplomat dan jenderal tingkat tinggi, atau justru berada di tangan para komandan teritorial dan administrator eksekusi di tingkat lokal. Pertanyaan-pertanyaan fundamental ini tidak hanya relevan bagi studi sejarah Indonesia kontemporer, tetapi juga bagi kemajuan metodologi disiplin ilmu sejarah secara universal mengenai cara merekonstruksi masa lalu yang melibatkan kekerasan absolut oleh negara. Mempertentangkan kedua *magnum opus* ini sama sekali bukan bertujuan untuk mencari eliminasi kebenaran, melainkan mengeksplorasi bagaimana kedua "lensa" analitis tersebut saling mengisi dalam mengonstruksi realitas sejarah yang sangat kompleks.¹³

Namun, sebuah analisis historiografi yang komprehensif tidak dapat berhenti pada pembacaan teks semata. Mengacu pada postulat metodologis mengenai kepenulisan (*authorship*), sebuah narasi sejarah selalu terkait erat dengan latar belakang penulisnya. Latar belakang intelektual, lintasan karier akademis, dan orientasi teoretis seorang sejarawan sangat memengaruhi dan menentukan proses seleksi fakta, interpretasi data, serta penyusunan alur narasi. Oleh karena itu, penelitian historiografis ini merasa perlu memasukkan dimensi Biografi Intelektual ke dalam kerangka analisisnya. Terdapat urgensi epistemologis untuk menelaah mengapa Robinson, dengan pengalamannya yang panjang di ranah advokasi HAM internasional, memprioritaskan peran negara dan sistem kekuasaan global, sementara Melvin, sebagai peneliti lapangan generasi milenial, lebih terobsesi pada detail forensik dan pembuktian operasional administratif.¹⁴

Melacak biografi intelektual kedua tokoh ini menjadi instrumen analitis yang vital untuk memahami genealogi pemikiran mereka. Robinson mewakili tradisi *Indonesianist* klasik yang membedah sejarah sebuah bangsa melalui struktur politik komparatif berskala besar, sementara Melvin mewakili gelombang sejarawan pemberontak yang berani membongkar tabu arsip teritorial secara mikro. Tanpa memahami konteks sosiologis dari akademis Robinson dan Melvin, historiografi akan kehilangan perspektif mengenai mengapa mereka menyusun sejarah tragedi 1965 dengan penekanan yang sedemikian berbeda. Oleh karena itu, urgensi penelitian ini terletak pada upaya serius melakukan

¹³ Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah* (Jakarta: Gramedia, 1992), 45.

¹⁴ Taufik Abdullah, *Sejarah dan Masyarakat: Lintasan Historis Islam di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), 102.

sintesis historiografis. Sejauh ini, belum banyak literatur akademik yang secara spesifik mendudukan kedua *magnum opus* terbitan 2018 ini secara berdampingan (*head-to-head*) untuk dianalisis secara komparatif secara proporsional.

Dengan menyandingkan Lensa Makro Robinson dan Lensa Mikro Melvin, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memperkaya perspektif akademis mengenai tragedi kemanusiaan 1965, tetapi juga memberikan kontribusi metodologis tentang perlunya dialog antara sejarah nasional, sejarah global, dan sejarah lokal. Pada akhirnya, penelitian ini berargumen kuat bahwa untuk dapat memahami skala dan efisiensi peristiwa pemusnahan massal 1965, penggunaan pendekatan yang bersifat eksklusif satu arah tidak lagi memadai. Diperlukan sebuah "visi ganda" (*double vision*) yakni kemampuan untuk menganalisis konstelasi politik global sekaligus menelaah presisi birokrasi yang memetakan di tingkat local guna membangun historiografi integratif yang lebih objektif dan merajut kembali serpihan data historis yang selama ini tercerai-berai.¹⁵

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana biografi serta latar belakang intelektual Geoffrey B. Robinson dan Jess Melvin yang memengaruhi perspektif kesejarahan mereka?
2. Bagaimana analisis historiografi tentang narasi kekerasan 1965 yang dikonstruksi dalam buku *The Killing Season* karya Robinson dan *The Army and the Indonesian Genocide* karya Melvin?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menelusuri biografi, latar belakang pendidikan, dan lintasan karier akademis Geoffrey B. Robinson dan Jess Melvin untuk memahami posisi penulis (*authorship*) dalam penulisan sejarah.

¹⁵ Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, terj. Nugroho Notokusanto (Jakarta: UI Press, 1986), 33.

2. Menganalisis secara kritis perbedaan konstruksi narasi kekerasan 1965 yang dibangun melalui pendekatan makro-historis dalam karya Robinson dan pendekatan mikro-historis dalam karya Melvin, serta implikasinya terhadap pemahaman sejarah nasional.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah historiografi Indonesia, khususnya dalam studi perbandingan sejarah (*comparative history*). Penelitian ini menawarkan kerangka analisis baru dengan mendudukan pendekatan makro dan mikro secara dialektis, sehingga dapat menjadi referensi bagi pengembangan metodologi penelitian sejarah kritis di lingkungan akademik.

2. Manfaat Praktis

Bagi masyarakat umum dan pegiat sejarah, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif dan berimbang mengenai tragedi 1965, menjauhkan pemahaman dari jebakan narasi tunggal atau bias ideologis, serta mendorong kesadaran akan pentingnya melihat sejarah dari berbagai perspektif (*multi-perspective*) demi proses rekonsiliasi bangsa.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk menegaskan kebaruan (*novelty*) dan posisi akademis penelitian ini, penulis melakukan tinjauan kritis terhadap literatur terdahulu mengenai peristiwa 1965. Berdasarkan pemetaan historiografis, karya-karya sebelumnya dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kecenderungan utama yang berbeda dengan pendekatan komparatif yang ditawarkan dalam skripsi ini.

1. Literatur Narasi Resmi Negara (Orde Baru)

Pertama diwakili oleh karya Nugroho Notosusanto dan Ismail Saleh berjudul *Tragedi Nasional: Percobaan Kup G 30 S/PKI di Indonesia* (1968). Karya ini

merupakan fondasi utama narasi sejarah versi Orde Baru yang memosisikan PKI sebagai dalang tunggal dan Angkatan Darat sebagai juru selamat.

Perbedaan dengan penelitian ini

Jika karya Nugroho bertujuan membangun legitimasi kekuasaan militer dengan menutupi fakta pembunuhan massal, penelitian ini justru bertujuan mendekonstruksi narasi tersebut menggunakan temuan Robinson dan Melvin yang membuktikan peran aktif militer dalam pembunuhan.

2. Literatur Revisionis Awal (Studi Akademis Asing)

Kedua adalah studi akademis awal yang menantang narasi resmi, terutama karya monumental Benedict Anderson dan Ruth McVey, *A Preliminary Analysis of the October 1, 1965 Coup in Indonesia* (1971), atau dikenal sebagai "Cornell Paper". Karya ini mengajukan tesis bahwa G30S adalah puncak konflik internal Angkatan Darat, bukan pemberontakan partai.

Perbedaan dengan penelitian ini

Meskipun kritis, "Cornell Paper" ditulis dengan keterbatasan akses sumber pada masanya. Penelitian ini melangkah lebih jauh dengan memanfaatkan arsip-arsip baru (arsip diplomatik Robinson dan arsip militer Melvin) yang belum tersedia saat Anderson dan McVey menulis analisis mereka.

3. Literatur Historiografi Baru Pasca-Reformasi

Ketiga adalah gelombang baru penulisan sejarah yang muncul setelah keterbukaan informasi. Karya John Roosa, *Dalih Pembunuhan Massal* (2006), menjadi tonggak penting yang menggeser fokus dari "siapa dalang G30S" menjadi "mengapa G30S dijadikan alasan pembunuhan massal". Selain itu, antologi Robert Cribb, *The Indonesian Killings* (1990), merintis jalan bagi studi variasi regional (lokal).

Posisi (State of the Art) Penelitian Ini

Karya Roosa lebih berfokus pada analisis *pretext* (dalih) di Jakarta, sementara Cribb merupakan kumpulan bunga rampai terpisah. Hingga saat ini, kajian mengenai

buku *The Killing Season* (Robinson) dan *The Army and the Indonesian Genocide* (Melvin) umumnya masih terbatas pada ulasan buku (*book review*) yang berdiri sendiri. Belum ada penelitian tingkat akademis yang secara spesifik mendudukkan kedua *magnum opus* terbitan tahun 2018 ini secara berdampingan (*head-to-head*). Oleh karena itu, skripsi ini mengisi kekosongan historiografis tersebut dengan melakukan studi komparatif sistematis menggunakan pisau analisis dikotomi Makro-Historis vs Mikro-Historis serta pendekatan Biografi Intelektual untuk menyintesis kedua perspektif tersebut.

F. Landasan Konseptual

Penelitian ini menggunakan kerangka konseptual yang bertumpu pada empat pilar utama, yakni historiografi, biografi intelektual, sejarah makro, dan sejarah mikro, yang disusun secara integratif untuk membedah anatomi kekerasan 1965. Landasan konseptual ini bukan sekadar alat bantu teknis, melainkan sebuah peta jalan epistemologis yang memungkinkan peneliti untuk melampaui narasi permukaan dan menggali akar terdalam dari produksi pengetahuan sejarah. Dengan memposisikan historiografi sebagai basis utama, peneliti ingin menegaskan bahwa sejarah 1965 bukan hanya tentang deretan fakta masa lalu, melainkan tentang bagaimana fakta tersebut diseleksi, diinterpretasikan, dan dikonstruksi oleh para sejarawan dalam konteks ruang dan waktu tertentu melalui dialektika intelektual yang kompleks.

Pilar biografi intelektual menjadi jembatan krusial untuk memahami bahwa setiap karya sejarah, termasuk karya Robinson dan Melvin, senantiasa membawa jejak pemikiran, ideologi, dan latar belakang pribadi penulisnya. Peneliti memandang bahwa objektivitas sejarah tidak berdiri di ruang hampa, melainkan dipengaruhi oleh perjalanan akademis dan komitmen moral sang sejarawan terhadap isu-isu kemanusiaan dan keadilan. Melalui pilar ini, penelitian tidak hanya berhenti pada apa yang tertulis dalam buku, tetapi masuk lebih dalam ke dalam "ruang kerja" intelektual kedua penulis untuk melihat bagaimana latar belakang mereka sebagai aktivis hak asasi manusia maupun penekun arsip forensik membentuk bias dan keunggulan metodologis masing-masing dalam memandang tragedi Indonesia.

Terakhir, penyandingan antara pilar sejarah makro dan sejarah mikro berfungsi sebagai instrumen analisis untuk membedah skala kekerasan yang multidimensional.

Sejarah makro digunakan untuk meneropong konstelasi kekuatan global dan geopolitik Perang Dingin yang menjadi panggung besar bagi peristiwa 1965, sementara sejarah mikro berperan penting dalam menyingkap detak nadi kekerasan di tingkat tapak yang sering kali tersembunyi di balik angka-angka statistik yang abstrak. Dengan mengintegrasikan kedua pilar ini, peneliti bertujuan untuk membangun sebuah narasi yang utuh, di mana kebijakan besar di tingkat internasional dapat terhubung secara organik dengan operasional birokrasi di tingkat lokal, sehingga menghasilkan sebuah pemahaman sejarah yang bersifat paripurna dan multidimensional.

1. **Historiografi**

Dalam penelitian ini, historiografi dipahami sebagai studi kritis tentang rekonstruksi masa lalu. Kuntowijoyo menegaskan bahwa historiografi bukan sekadar catatan peristiwa, melainkan sejarah dari penulisan sejarah itu sendiri yang dipengaruhi oleh semangat zaman (*zeitgeist*) dan subjektivitas sejarawan.¹⁶

2. **Biografi Intelektual (*Intellectual Biography*)**

Konsep ini digunakan untuk membedah latar belakang penulis. Sebagaimana dikemukakan Taufik Abdullah, karya sejarah tidak pernah bebas nilai. Latar belakang pendidikan, ideologi, dan pengalaman hidup sejarawan (Robinson sebagai aktivis/ilmuwan politik dan Melvin sebagai peneliti lapangan) membentuk kaca mata yang mereka gunakan dalam menyeleksi fakta.¹⁷

3. **Sejarah Makro (*Macro-History*)**

Pendekatan ini berfokus pada struktur, pola, dan proses berskala besar. Sejarah makro cenderung menganalisis dinamika di tingkat negara atau sistem internasional.¹⁸ Dalam konteks ini, karya Robinson dikategorikan sebagai sejarah makro karena fokusnya pada politik nasional di Jakarta dan geopolitik Perang Dingin.

¹⁶ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Benteng Pustaka, 2013), 16.

¹⁷ Taufik Abdullah, *Sejarah dan Masyarakat: Lintasan Historis Islam di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), 102.

¹⁸ Peter N. Stearns, "Social History," dalam *The Oxford Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences* (Oxford: Pergamon, 2001), 14361.

4. Sejarah Mikro (*Micro-History*)

Sebagai antitesisnya, sejarah mikro memfokuskan analisis pada unit sosial yang kecil (lokal) untuk memahami persoalan besar. Dipelopori oleh Carlo Ginzburg, pendekatan ini percaya bahwa kebenaran sejarah sering tersembunyi dalam detail kecil.¹⁹ Karya Melvin dikategorikan di sini karena menggunakan arsip lokal Aceh untuk membongkar mekanisme genosida nasional.

G. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah kritis dengan pendekatan historiografi komparatif. Tahapan penelitian mengikuti kaidah metodologis sebagai berikut:

1. Heuristik (Pengumpulan Sumber)

Tahap pertama adalah heuristik, yaitu proses pengumpulan sumber-sumber yang relevan dengan topik penelitian. Penulis mengumpulkan data yang diklasifikasikan menjadi dua kategori:

a) Sumber Primer

Objek Kajian Utama

Merupakan dua karya historiografi yang menjadi fokus bedah komparatif:

1. Buku *The Killing Season: A History of the Indonesian Massacres, 1965-66* (Edisi Indonesia: *Musim Menjagal*) karya Geoffrey B. Robinson.
2. Buku *The Army and the Indonesian Genocide: Mechanics of Mass Murder* (Edisi Indonesia: *Berkas Genosida Indonesia*) karya Jess Melvin.

Dokumen Arsip dan Laporan Resmi

1. Arsip Militer Indonesia (1965-1966)

¹⁹ Carlo Ginzburg, *The Cheese and the Worms: The Cosmos of a Sixteenth-Century Miller* (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1980), xx.

Termasuk dokumen "Instruksi Pangdahan A No. Instr-1/10/1965 tentang Pembuatan Ruang Yudha", laporan intelijen Kodam I/Iskandar Muda ("Chronologis"), dokumen "Peta Kematian" (*Death Maps*), serta Radiogram Panglima Mandala I.

2. Arsip Diplomatik Asing

Dokumen *Foreign Relations of the United States* (FRUS) Vol. XXVI yang merekam komunikasi Kedubes AS dan CIA, serta arsip *Foreign Office* (FO 371) Kerajaan Inggris terkait propaganda.

3. Dokumen Legal & HAM

Laporan Penyelidikan Komnas HAM Peristiwa 1965-1966, Laporan Amnesty International (1977 & 1994), serta Konvensi Genosida PBB 1948.

b) Sumber Sekunder

Merupakan literatur pendukung berupa buku, artikel jurnal, dan penelitian terdahulu yang digunakan sebagai alat bantu analisis (komparasi) dan kritik

1. Literatur Klasik & Orde Baru

Karya Nugroho Notosusanto (*Tragedi Nasional*) sebagai representasi narasi negara, dan *Cornell Paper* karya Anderson & McVey sebagai pembanding awal.

2. Studi Regional & Tematik

Karya Vanessa Hearman (*Unmarked Graves*) untuk perbandingan kasus Jawa Timur, John Roosa (*Dalih Pembunuhan Massal*) untuk konteks G30S Jakarta, dan Robert Cribb (*The Indonesian Killings*).

3. Analisis Khusus

Kajian gender oleh Annie Pohlman (*Women, Sexual Violence*), analisis terorisme negara oleh Ariel Heryanto, serta studi ekonomi-politik oleh Bradley Simpson dan Greg Poulgrain.

2. Kritik Sumber (Verifikasi)

Tahap verifikasi merupakan proses pengujian terhadap data yang telah dikumpulkan pada tahap heuristik guna memperoleh kebenaran sejarah yang objektif. Dalam kajian historiografi ini, verifikasi menjadi sangat krusial mengingat kompleksitas narasi peristiwa 1965 yang sering kali bersinggungan dengan kepentingan politik dan ideologi tertentu.

Oleh karena itu, peneliti tidak hanya menempatkan buku Robinson dan Melvin sebagai objek bacaan, tetapi sebagai dokumen sejarah yang harus diuji tingkat otentisitas dan kredibilitasnya. Proses ini dilakukan melalui dua pendekatan utama, yakni kritik eksternal terhadap aspek fisik sumber dan kritik internal terhadap substansi narasi yang dibangun.

a) Buku Berkas Genosida Indonesia (Jess Melvin, 2018) – Edisi Indonesia

1. Kritik Ekstern:

Peneliti menggunakan buku fisik asli terbitan Komunitas Bambu. Kondisi naskah sangat baik, original, dan lengkap, sehingga memudahkan verifikasi setiap sitasi dan lampiran dokumen yang ada di dalamnya.

2. Kritik Intern:

Sumber ini sangat kredibel karena menyajikan bukti fisik berupa arsip militer domestik. Isinya membongkar mekanika pembunuhan yang terorganisir di Aceh, menjelaskan bahwa genosida bukan spontanitas massa, melainkan operasi militer birokratis melalui pembentukan Ruang Yudha untuk koordinasi penumpasan. Peneliti melihat Melvin secara brilian berhasil memetakan bagaimana birokrasi militer digunakan untuk menggerakkan regu jagal sipil, serta bagaimana militer mendokumentasikan setiap nyawa yang hilang dalam statistik yang dingin namun akurat.

b) **Buku Musim Menjagal (Geoffrey B. Robinson, 2018) – Edisi Indonesia**

1. **Kritik Ekstern:**

Peneliti menggunakan buku fisik asli terbitan Komunitas Bambu. Keaslian buku ini menjamin data lampiran kabel diplomatik internasional yang dikutip di dalamnya adalah sesuai dengan sumber aslinya.

2. **Kritik Intern:**

Robinson secara kredibel membedah keterlibatan aktor internasional. Isinya sangat mendalam dalam menjelaskan bagaimana Amerika Serikat dan Inggris memfasilitasi kekerasan dengan memberikan bantuan komunikasi dan daftar nama target. Peneliti mencermati analisis Robinson mengenai "logika militer" yang memanfaatkan momen 1 Oktober untuk menciptakan kondisi darurat nasional demi melegitimasi pembantaian. Peneliti juga mendalami argumen Robinson bahwa kekerasan ini tidak mungkin terjadi dalam skala masif tanpa dukungan logistik dan moral dari kekuatan Barat.

c) **Buku *The Army and the Indonesian Genocide & The Killing Season* (Edisi Inggris)**

1. **Kritik Ekstern:**

Sumber ini berbentuk PDF utuh (*full text*) dari penerbit *Routledge* dan *Princeton University Press*. Naskah digital ini bersih dan identik dengan versi cetak aslinya.

2. **Kritik Intern:**

Peneliti menggunakan versi asli ini untuk melakukan rujukan silang guna memastikan tidak ada pergeseran makna dalam proses penerjemahan naskah ke Bahasa Indonesia. Peneliti berfokus pada terminologi hukum internasional seperti *crime against humanity* dan *genocide* yang digunakan penulis untuk memastikan bahwa penggunaan istilah tersebut dalam skripsi ini memiliki landasan teoritis yang kuat sesuai teks aslinya.

d) **Buku *Buried Histories & Pretext for Mass Murder* (John Roosa, 2006 & 2020)**

1. **Kritik Ekstern:**

Menggunakan naskah PDF utuh dari *University of Wisconsin Press*. Teks orisinal dan terbaca sempurna dengan atribut akademik yang lengkap.

2. **Kritik Intern:**

Roosa memberikan analisis tajam mengenai peristiwa G30S sebagai dalih. Isinya membongkar kebohongan propaganda militer mengenai penyiksaan jenderal di Lubang Buaya melalui analisis dokumen autopsi yang dilakukan dokter militer sendiri. Peneliti menggunakan karya Roosa untuk memperkuat argumen bahwa kekerasan massal dilakukan setelah adanya konstruksi narasi kebencian yang disengaja. Roosa secara meyakinkan menunjukkan bahwa peristiwa G30S hanyalah pintu masuk bagi rencana besar militer yang sudah dipersiapkan sebelumnya untuk melenyapkan PKI.

e) **Buku *Economists with Guns* (Bradley Simpson, 2008)**

1. **Kritik Ekstern:**

Menggunakan naskah PDF utuh dari *Stanford University Press*.

2. **Kritik Intern:**

Peneliti membedah argumen Simpson mengenai keterkaitan antara genosida dan pembangunan ekonomi. Isinya membuktikan bahwa pembantaian 1965 adalah prasyarat bagi masuknya modal asing ke Indonesia. Simpson secara kredibel menunjukkan bahwa negara Barat melihat militer sebagai instrumen "modernisasi" yang menormalisasi kekerasan demi stabilitas pasar kapitalis. Peneliti menggarisbawahi temuan Simpson bahwa kucuran dana dan utang baru dari IMF dan Bank Dunia mengalir seiring dengan keberhasilan militer dalam "membersihkan" elemen kiri dari birokrasi dan serikat buruh.

f) **Buku *State Terrorism and Political Identity* (Ariel Heryanto, 2006)**

1. **Kritik Ekstern:**

Menggunakan naskah PDF berkualitas tinggi dari penerbit *Routledge*.

2. **Kritik Intern:**

Peneliti melihat karya ini sebagai jembatan untuk memahami dampak trauma sistemik. Isinya menjelaskan bagaimana negara menciptakan identitas musuh melalui teror simbolis. Peneliti menggunakan analisis Heryanto untuk mengkritisi bagaimana stigma "tidak bersih lingkungan" digunakan sebagai alat pendisiplinan sosial jangka panjang. Heryanto membongkar bagaimana kekerasan fisik pada 1965 bertransformasi menjadi kekerasan simbolis yang menghantui identitas politik korban dan keturunannya selama berdekade-dekade.

g) **Buku *History in Uniform* (Katherine McGregor, 2007)**

1. **Kritik Ekstern:**

Menggunakan PDF utuh dari *NUS Press*.

2. **Kritik Intern:**

Peneliti mendalami isinya mengenai historiografi militer. McGregor membongkar bagaimana militer menyusun narasi sejarah melalui museum dan monumen. Analisis ini membantu peneliti mengkritisi mengapa fakta genosida ditutupi dan diganti dengan narasi kepahlawanan militer dalam ingatan kolektif bangsa. Peneliti mencatat bagaimana Nugroho Notosusanto berperan sentral dalam mensakralkan narasi Orde Baru melalui penulisan sejarah resmi yang diajarkan di sekolah-sekolah.

h) **Buku *The Indonesian Killings* (Robert Cribb, 1990)**

1. **Kritik Ekstern:**

Menggunakan PDF utuh dari *Monash University*.

2. **Kritik Intern:**

Peneliti mencermati disparitas angka korban dalam kumpulan studi kasus daerah ini. Isinya memberikan perspektif regional yang beragam (Jawa dan Bali), membantu peneliti memahami dinamika lokal yang dipengaruhi ketegangan sosiopolitik di tingkat tapak. Peneliti menggunakan data Cribb untuk membuktikan bahwa meskipun ada komando pusat, pola pembunuhan di setiap daerah dipengaruhi oleh dendam lokal dan struktur agraria yang berbeda-beda.

i) **Arsip Kodam I/Iskandar Muda (1965-1966)**

1. **Kritik Ekstern:**

Berupa reproduksi foto dokumen intelijen dan operasional (Telegram T-503/65, Instruksi Ruang Yudha). Peneliti memverifikasi keasliannya melalui stempel jabatan dan format mesin tik era 60-an.

2. **Kritik Intern:**

Peneliti melakukan pembacaan mendalam terhadap bahasa birokrasi di dalamnya. Istilah seperti penyelesaian atau pembersihan dikritisi sebagai eufemisme pembunuhan massal. Dokumen ini dianggap bukti paling jujur karena mencatat jumlah tahanan dan lokasi eksekusi (Peta Kematian) untuk kepentingan internal militer. Peneliti menyimpulkan bahwa arsip ini adalah bukti tak terbantahkan bahwa negara tidak sedang absen saat pembantaian, melainkan sedang bekerja dengan sangat teliti.

j) **Dokumen *Foreign Relations of the United States (FRUS) Vol. XXVI***

1. Kritik Ekstern:

Menggunakan salinan deklasifikasi resmi pemerintah AS. Otentisitas kabel diplomatik terjamin melalui kode pengiriman resmi.

2. Kritik Intern:

Peneliti mengkritisi komunikasi Kedutaan Besar AS di Jakarta. Isinya menunjukkan kegembiraan diplomatik atas kehancuran PKI. Peneliti melihat sumber ini sebagai bukti kredibel bahwa genosida 1965 merupakan bagian dari desain geopolitik global selama Perang Dingin. Peneliti menyoroti memo-memo yang menunjukkan betapa AS sangat menyadari skala pembantaian namun memilih untuk memberikan dukungan logistik rahasia.

k) **Buku *Metodologi Pengantar Ilmu Sejarah (Kuntowijoyo, 2013)***

1. Kritik Ekstern:

Menggunakan buku fisik asli (original). Kualitas cetakan menjamin integritas naskah metodologi yang dikutip.

2. Kritik Intern:

Isinya memberikan landasan objektivitas. Kuntowijoyo membimbing peneliti untuk memisahkan antara fakta sejarah dan opini subjektif dalam membedah tragedi kemanusiaan. Peneliti menerapkan metode verifikasi Kuntowijoyo untuk memastikan setiap klaim dalam skripsi ini didukung oleh bukti tertulis yang kuat.

l) **Buku *Metodologi Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah (Sartono Kartodirdjo, 1992)***

1. Kritik Ekstern:

Menggunakan buku fisik asli. Meskipun terbitan lama, integritas fisik buku tetap terjaga.

2. Kritik Intern:

Isinya memperkenalkan pendekatan multidimensional. Peneliti menggunakan landasan ini untuk melihat peristiwa 1965 tidak hanya sebagai konflik politik, tetapi juga dari perspektif sosiologis dan struktur kekuasaan lokal. Peneliti mengadopsi cara pandang Sartono untuk melihat kaitan antara konflik agraria di pedesaan dengan mobilisasi massa oleh militer.

m) Sumber Majalah dan Koran (Kompas, Newsweek, Tempo, NYT)

1. Kritik Ekstern:

Peneliti memiliki koleksi fisik dalam kondisi baik. Oksidasi kertas pada koleksi lama menunjukkan usia aslinya, namun teks terbaca 100%.

2. Kritik Intern:

Digunakan untuk melihat konstruksi narasi publik. Berita *Tempo* (1986) tentang stigma dan *New York Times* (2015) tentang pembungkaman sejarah di Bali dikritisi untuk menunjukkan bagaimana sensor negara bekerja dalam memelihara impunitas. Peneliti menemukan bahwa media massa sering kali menjadi alat normalisasi kekerasan melalui pembingkai berita yang menyudutkan korban.

n) Buku *Unmarked Graves* (Vanessa Hearman, 2018)

1. Kritik Ekstern:

Menggunakan naskah PDF utuh dari *NUS Press*.

2. Kritik Intern:

Peneliti mendalami narasi mengenai kelangsungan hidup korban di Jawa Timur. Isinya sangat kredibel dalam menyajikan sejarah lisan yang menunjukkan pola kekerasan militer yang identik dengan temuan Melvin di Aceh. Peneliti menggunakan data Hearman untuk membuktikan adanya konsistensi operasional militer (komando pusat) yang dijalankan secara seragam di seluruh Indonesia.

o) **Buku Sejarah Indonesia Modern (M.C. Ricklefs, 2008)**

1. Kritik Ekstern:

Menggunakan buku fisik asli terbitan Serambi.

2. Kritik Intern:

Isinya memberikan kerangka kronologis makro. Peneliti menggunakan data Ricklefs untuk memverifikasi konteks politik nasional yang melatarbelakangi terjadinya transisi kekuasaan dari Sukarno ke Soeharto. Peneliti mencermati analisis Ricklefs mengenai pergeseran peta kekuatan dari Nasakom menuju dominasi tunggal militer pasca-1965.

p) **Buku *The Army and Politics in Indonesia* (Harold Crouch, 1978)**

1. Kritik Ekstern:

Menggunakan naskah PDF utuh dari *Cornell University Press*.

2. Kritik Intern:

Peneliti mendalami analisis Crouch mengenai faksionalisme dalam tubuh militer. Isinya memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana Soeharto mengonsolidasikan kekuasaan melalui pembersihan internal militer pasca-G30S. Peneliti menggunakan rujukan ini untuk menjelaskan bahwa militer tidak hanya membersihkan musuh di luar (PKI), tetapi juga melakukan pembersihan birokrasi di dalam tubuhnya sendiri untuk memastikan loyalitas tunggal.

q) **Buku *The Religion of Java* (Clifford Geertz, 1960)**

1. Kritik Ekstern:

Menggunakan naskah PDF utuh dari *Free Press*.

2. Kritik Intern:

Peneliti mendalami kategori sosiologis Abangan, Santri, dan Priyayi. Isinya membantu peneliti memahami basis dukungan PKI di kalangan petani Jawa. Peneliti secara kritis melihat bagaimana pembagian aliran yang dipetakan Geertz ini kemudian dieksploitasi oleh militer untuk menciptakan konflik horizontal yang berdarah sebagai kedok bagi operasi militer vertikal.

3. Interpretasi

Tahap interpretasi merupakan fase krusial di mana peneliti merangkai fakta-fakta yang telah diverifikasi dari karya Geoffrey B. Robinson dan Jess Melvin menjadi satu kesatuan analisis yang bermakna (*synthesis analysis*). Dalam konteks penelitian historiografi komparatif ini, interpretasi tidak sekadar menerjemahkan teks, melainkan melakukan dialog kritis antara kedua narasi tersebut.

Peneliti akan memetakan titik-titik konvergensi (persamaan) dan divergensi (perbedaan) argumen kedua sejarawan, khususnya terkait kausalitas kekerasan, peran aktor militer, dan dinamika hubungan pusat-daerah. Tujuannya adalah untuk melihat bagaimana satu peristiwa sejarah yang sama dapat dikonstruksi menjadi dua narasi yang berbeda akibat perbedaan pendekatan metodologis.

Berdasarkan pembacaan awal terhadap sumber primer, peneliti mengajukan hipotesis sementara bahwa perbedaan narasi antara Robinson dan Melvin bukanlah kontradiksi yang saling membatalkan, melainkan refleksi dari perbedaan kredibilitas dan jenis sumber yang digunakan. Narasi Robinson yang cenderung Jakarta-sentris memiliki kekuatan validitas pada arsip diplomatik yang merekam kebijakan politik tingkat tinggi (*high politics*), namun memiliki keterbatasan dalam memotret realitas lapangan.

Sebaliknya, narasi Melvin yang Aceh-sentris memiliki validitas forensik yang tinggi karena didukung oleh arsip internal militer yang merekam pelaksanaan operasional (*execution*), namun terbatas dalam menjelaskan konteks geopolitik global. Interpretasi ini akan membuktikan bahwa kedua jenis sumber tersebut memiliki "kebenaran" di levelnya masing-masing yang harus didudukkan secara proporsional.

Proses interpretasi ini akan dilakukan secara ketat dengan mengacu pada keterkaitan dan kesesuaian teori yang telah dibangun dalam landasan konseptual. Kerangka teori *Macro-History* dan *Micro-History* akan digunakan sebagai pisau bedah utama untuk menjelaskan fenomena perbedaan skala analisis tersebut.

Teori ini akan membantu menjelaskan mengapa Robinson lebih menekankan struktur politik global (Perang Dingin) sebagai determinan utama, sedangkan Melvin lebih menekankan pada agensi lokal dan struktur birokrasi militer. Selain itu, konsep *authorship* (kepenulisan) akan digunakan untuk menginterpretasikan bagaimana latar belakang intelektual Robinson sebagai ilmuwan politik dan Melvin sebagai peneliti lapangan turut membentuk corak penulisan sejarah mereka.

Pada akhirnya, tahap interpretasi ini diarahkan untuk menghasilkan sebuah kebaruan (*novelty*) historiografis. Penelitian ini berupaya melampaui perdebatan klasik mengenai "siapa dalang peristiwa 1965", menuju pada sintesis metodologis. Peneliti akan menyusun argumen bahwa pemahaman utuh tentang tragedi 1965 hanya dapat dicapai dengan mengintegrasikan lensa makro (arsitektur politik pusat) dan lensa mikro (mekanisme eksekusi daerah). Sintesis ini diharapkan dapat menawarkan model penulisan sejarah baru yang menjembatani kesenjangan antara sejarah nasional dan sejarah lokal dalam satu tarikan napas narasi yang komprehensif.

4. Historiografi

Tahap terakhir adalah historiografi, yaitu proses rekonstruksi dan penulisan laporan penelitian. Hasil analisis dan sintesis di atas dituangkan ke dalam bentuk skripsi yang sistematis, logis, dan ilmiah sesuai dengan kaidah penulisan akademis di UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Penulisan disusun dalam empat bab yang saling berkaitan, mulai dari pendahuluan, pemaparan biografi dan karya, diskusi perbandingan, hingga kesimpulan akhir.